

# PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur

Dwi Ratnasari<sup>1</sup>  
Dianita Meirini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,  
Indonesia

\*Correspondences : [saridwi242@gmail.com](mailto:saridwi242@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan SILPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diprosikan melalui rasio keuangan berupa rasio efisiensi. Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai pendekatan pada penelitian ini. Sampel jenuh untuk teknik pengambilan sampel. Teknik analisis data pada penelitian ini berupa uji regresi data panel. Berdasarkan hasil uji T-test, kinerja keuangan tidak dapat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah tetapi kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara negatif signifikan oleh dana perimbangan dan SILPA, serta kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara positif signifikan oleh belanja modal.

Kata Kunci: PAD; Dana Perimbangan; Belanja Modal; SILPA; Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

*PAD, Balancing Fund, Capital Expenditure, SILPA and Regional Government Financial Performance in East Java*

## ABSTRACT

The purpose of the study was to examine the effect of local revenue, balancing funds, capital expenditures and SILPA on the financial performance of local governments as proxied through financial ratios in the form of efficiency ratios. A quantitative approach is used as an approach in this study. Saturated sample for sampling technique. The data analysis technique in this study was a panel data regression test. Based on the results of the T-test, financial performance cannot be affected by local revenue but financial performance can be significantly affected negatively by balancing funds and SILPA, and financial performance can be significantly affected positively by capital expenditures.

Keywords: PAD; Balancing Fund; Capital Expenditures; SILPA; Local Government Financial Performance.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 5  
Denpasar, 28 Mei 2022  
Hal. 1189-1199

DOI:  
10.24843/EJA.2022.v32.i05.p06

## PENGUTIPAN:

Ratnasari, D., & Meirini, D.  
(2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1189-1199

## RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
9 April 2022  
Artikel Diterima:  
25 Mei 2022

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah penting untuk diperhatikan oleh pihak eksekutif maupun legislatif dalam memberikan pertanggungjawaban atas segala informasi keuangan serta informasi penganggaran dan perencanaan (Rokhmah, 2021). Akuntabilitas organisasi dinilai dengan evaluasi kinerja keuangan atas laporan keuangan dalam menghasilkan sebuah pelayanan publik dimana pemerintah yang membelanjakan uang publik harus memiliki kemampuan belanja yang ekonomis, efektif dan efisien (Mardiasmo, 2009). Dalam hal ini pemerintah sebagai agen yang mengambil keputusan dan bertanggungjawab kepada masyarakat sebagai principal yang termuat dalam teori keagenan (Jensen & Meckling, 2019). Teori keagenan di sektor publik mempercayakan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang optimal dan merata (Aswar, 2019). Hal ini dipertanggungjawabkan pemerintah daerah dengan membuat indikator evaluasi kinerja dan satuan ukur masing-masing kegiatan dengan menggunakan peran akuntansi manajemen sehingga tingkat efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi dapat diketahui sehingga mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009).

Dalam perwujudan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki wewenang penuh mengatur daerahnya sendiri dalam mendorong peningkatan APBD. Adanya pertumbuhan pendapatan dari wilayah itu sendiri akhirnya dapat mendorong adanya perbaikan infrastruktur serta sarana dan prasarana untuk menambah nilai investasi daerah. Adanya infrastruktur yang memadai serta investasi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan angka PAD dan dapat mengucurkan dana perimbangan dari pusat dalam rangka menambah belanja modal daerah tersebut (Thalib, 2019). Selain itu efisiensi penggunaan anggaran yang akan menimbulkan surplus anggaran dapat dipergunakan untuk periode selanjutnya sehingga dapat digunakan sebagai anggaran awal dalam pengelolaan pemerintahan (Djuniar & Zuraida, 2018).

Fenomena pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini, realisasi pendapatan daerah Jawa Timur tahun 2018, 2019, dan 2020 selalu melebihi target meskipun berada pada kondisi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, penerimaan PAD Pemprov Jawa Timur menurun 7% dari Rp 19.327.125.485.405,9 menjadi Rp 17.951.235.057.953,1 serta terjadi penurunan penerimaan PAD pada 16 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain itu, pencapaian realisasi belanja sebesar Rp 32,28 T atau 93,41% dari penetapan belanja tahun 2020 yaitu sebesar Rp 34,56 triliun (Wijayanto, 2021). Pencapaian tahun 2020 lebih baik dibanding 3 tahun sebelumnya. Pada saat resesi ekonomi ini, pemerintah seharusnya mengoptimalkan kegiatan belanja daerah karena belanja harusnya menjadi penopang roda perekonomian daerah. Masalah lain yaitu belanja modal yang tidak sebanding dengan belanja lain yang mengakibatkan pengeluaran belanja modal kurang sehat. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menunjukkan SILPA sebesar 3,7 triliun ini terbilang cukup besar, SILPA tersebut dipertanyakan apakah terjadi pelampauan pendapatan atau penghematan pengeluaran. Hal ini juga terjadi pada pemerintah daerah Jawa Timur, yaitu 10 Pemda dengan tingkat SILPA yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya (Wijayanto, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana faktor finansial mempengaruhi kinerja keuangan. Variabel SILPA ditambahkan untuk menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran karena SILPA mengukur kelebihan atau kekurangan anggaran dan pembiayaan pemerintah daerah. Diharapkan dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik dalam memperoleh pendapatan dan melakukan belanja negara dapat meningkatkan pelayanan kepada publik dalam perwujudan desentralisasi.

Sumber keuangan yang bersumber dari wilayah itu sendiri disebut pendapatan asli daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali PAD sangat penting untuk memperbesar alokasi PAD terhadap APBD. Tidak hanya memperbesar PAD, tetapi juga mampu memanfaatkan PAD untuk menciptakan lapangan kerja sehingga perekonomian dapat berputar di daerah tersebut (Sumawan & Sukartha, 2016). Apabila PAD mengalami peningkatan maka ketergantungan suatu wilayah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin kecil yang dapat menurunkan nilai kinerja keuangan berdasarkan rasio efisiensi (Mulyani & Wibowo, 2017). Semakin tinggi PAD juga mempermudah walikota atau bupati dalam pengambilan keputusan (Gomes *et al.*, 2013). Sesuai dengan teori keagenan bahwa dengan meningkatnya PAD maka pemerintah daerah dapat menghimpun dan mengelola pendapatan yang berasal dari masyarakat untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat (Thalib, 2019). Penelitian dari (Elmiza & Arza, 2020), (Thalib, 2019) (Sari, 2019), dan (Prastiwi & Aji, 2020) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan

H<sub>1</sub>: PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana yang ditransfer pemerintah pusat dari APBN guna mendanai kebutuhan suatu daerah dalam menjalankan rumah tangganya disebut sebagai dana perimbangan (UU RI Nomor 33 Tahun 2004, 2004). Dana perimbangan juga digunakan untuk mengurangi ketimpangan sumber dana pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah (Madjodjo *et al.*, 2020). Apabila dana perimbangan yang dikucurkan kepada daerah semakin besar, maka kinerja keuangan menjadi semakin baik. Kinerja yang baik ini membuat nilai kinerja keuangan menurun ketika diukur dengan rasio efisiensi (Mulyani & Wibowo, 2017). Dengan meningkatnya dana perimbangan daerah, maka terjadi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat yang artinya harus melakukan pengelolaan keuangan dengan baik agar pemerintah daerah dapat dipercaya oleh masyarakat sesuai dengan teori keagenan (Thalib, 2019). Dalam penelitian (Yasin *et al.*, 2017), Sari (Sari, 2019), (Awwaliyah *et al.*, 2019), (Prastiwi & Aji, 2020), dan (Thalib, 2019), kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara negatif signifikan oleh dana perimbangan sehingga efisiensi penggunaan dana transfer dari pusat untuk menyusutkan kekurangan sumber finansial.

H<sub>2</sub>: Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengeluaran biaya untuk memperoleh suatu aktiva tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode serta lebih dari batas minimum

kaputalisasi aset tetap/lain yang telah ditetapkan pemerintah disebut belanja modal (Fajri, 2016). Semakin banyak belanja modal yang dilakukan mencerminkan adanya pembangunan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adanya belanja oleh pemerintah ini dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan ekonomi (Udoka & Anyingang, 2015). Pertumbuhan ini akan berdampak pada periode mendatang dimana dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan peningkatan investor (Arsallya *et al.*, 2021). Nilai belanja modal yang tinggi dapat menurunkan nilai kinerja keuangan (Mulyani & Wibowo, 2017). Sesuai teori keagenan, peningkatan belanja modal dapat menambah infrastruktur yang digunakan dalam mensejahterakan masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan pembangunan dan menambah pendapatan masyarakat (Thalib, 2019). Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh belanja modal secara negatif dari penelitian (Antari & Sedana, 2018) dan (Nugroho & Rohman, 2016).

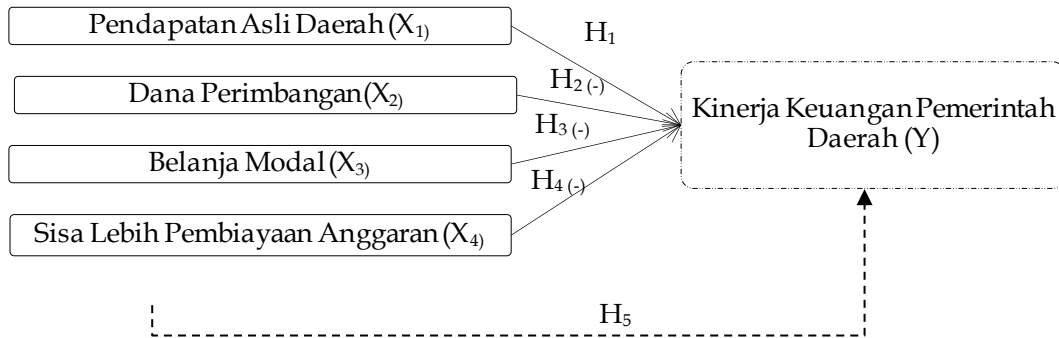
H<sub>3</sub>: Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut (Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, 2010) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau disingkat SILPA merupakan selisih dari surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan neto. SILPA dapat digunakan sebagai indikator efisiensi belanja suatu daerah karena komponen penerimaan dinilai lebih besar dari komponen pembiayaan (Mariyam, 2019). Di berbagai daerah, angka SILPA dalam APBD/APBN menunjukkan angka nol yang berarti pembiayaan yang ada pada suatu daerah dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran agar anggaran dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga kinerja keuangan dapat meningkat (Djuniar & Zuraida, 2018). Adanya angka SILPA yang rendah menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang ekonomis, efektif dan efisien sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan strategi yang di gunakan sehingga dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang berasal dari rakyat untuk dikembalikan kepada rakyat dengan baik. Penelitian (Djuniar & Zuraida, 2018) kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara negatif oleh SILPA.

H<sub>4</sub> : SILPA berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Antari & Sedana (2018) pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dapat digunakan dalam peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat dipergunakan untuk belanja modal dalam pembangunan serta perbaikan infrastruktur umum. Menurut (Rantebalik *et al.*, 2018) dengan pembelanjaan daerah yang sesuai dengan rencana pemerintah daerah pada APBD akan menekan defisit pada SILPA.

H<sub>5</sub>: PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan SILPA berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi operasional	Pengukuran	Skala data	Sumber
<b>Variabel Terikat (Y)</b>				
Kinerja keuangan	Gambaran pencapaian hasil kerja keuangan daerah yang diukur dengan Rasio Efisiensi	$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio	(Thalib, 2019)
<b>Variabel Bebas (X)</b>				
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Total realisasi pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri	$\text{PAD} = \text{pajak daerah} + \text{retribusi daerah} + \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah} + \text{lain - lain PAD yang sah}$	Rasio	(Mulyani & Wibowo, 2017)
Dana Perimbangan (X2)	Jumlah seluruh realisasi dari pemerintah pusat	$\text{Dana perimbangan} = \text{DBH} + \text{DAU} + \text{DAK}$	Rasio	(Mulyani & Wibowo, 2017)
Belanja Modal (X3)	Belanja langsung yang terdapat dalam anggaran pemerintah daerah yang menambah masa manfaat aset tetap	$\text{BM} = \text{Belanja tanah} + \text{peralatan dan mesin} + \text{gedung dan bangunan} + \text{jalan, irigasi, dan jaringan} + \text{aset tetap lainnya} + \text{konstruksi dalam pengerjaan} + \text{aset lainnya}$	Rasio	(Mulyani & Wibowo, 2017)
SILPA (X4)	Selisih surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto	$\text{SILPA} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Jumlah Pembiayaan Netto}$	Rasio	(Elmiza & Arza, 2020)

Sumber: Data Penelitian, 2022

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini berupa pemerintahan daerah kabupaten dan kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) di Provinsi Jawa Timur dengan tahun pengamatan 5 tahun, yaitu tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti berupa sampel jenuh sehingga diperoleh total sampel sebanyak 190. Sumber data berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah

di Jawa Timur tahun 2016-2020 dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan website resmi pemerintah daerah terkait.

Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan dibantu aplikasi Eviews 10 (Widarjono, 2018). Persamaan regresi data panel adalah sebagai berikut.  

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD)
- $\alpha$  = konstanta atau intercept
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = koefisien regresi
- X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X2 = Dana Perimbangan (DP)
- X3 = Belanja Modal (BM)
- X4 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- $\epsilon$  = error, variabel pengganggu
- i = periode waktu
- t = individu/entitas.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data yang diperoleh oleh peneliti dilakukan transformasi logaritma untuk menghindari adanya heteroskedasitas. Hal ini dikarenakan transformasi logaritma dapat mengurangi skala pengukuran variabel (Ghozali & Ratmono, 2017). Data yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah 189 karena adanya outlier. Analisis statistik deskriptif adalah gambaran mengenai data penelitian yang terdiri dari variabel-variabel penelitian yang dijadikan sebagai sampel secara statistik. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Modal	SILPA	Kinerja Keuangan
<i>Mean</i>	26,542	27,887	26,597	26,148	4,598
<i>Median</i>	26,3423	27,964	26,617	26,133	4,601
<i>Maximum</i>	29,314	28,970	28,644	28,428	4,835
<i>Minimum</i>	25,420	26,976	25,056	24,130	4,158
<i>Std. Dev.</i>	0,706	0,398	0,593	0,803	0,061
N	189	189	189	189	189

Sumber : Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji statistik deskriptif menunjukkan jumlah sampel data (N) untuk masing-masing varibel adalah 189. Variabel PAD memiliki nilai minimum 25,420 dan nilai maksimum 29,314. Rata-rata variabel PAD adalah 26,542 dan standar deviasi sebesar 0,706. Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai minimum 26,976 dan nilai maksimum 28,970. Rata-rata variabel dana perimbangan adalah 27,887 dan standar deviasi sebesar 0,398. Pada variabel belanja modal memiliki nilai minimum 25,056 dan maksimum 28,644. Nilai rata-rata 26,597 dan standar deviasi sebesar 0,539. Pada variabel SILPA memiliki nilai minimum 24,130 dan maksimum 28,428. Nilai rata-rata SILPA 26,148 dan standar deviasi sebesar 0,803. Variabel kinerja keuangan selama penelitian memiliki nilai minimum 4,158 dan nilai maksimum 4,835. Rata-rata variabel kinerja keuangan periode penelitian adalah 4,539 dan standar deviasi sebesar 0,061.

Pengujian ini dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Berdasarkan uji asumsi klasik diperoleh hasil bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel, data terdistribusi normal dengan nilai probability 0,065, tidak mengindikasikan adanya heteroskedasitas serta tidak terjadi autokorelasi. Oleh karena itu, pengujian dilanjutkan dengan pemilihan model penelitian analisis regresi data panel. Model analisis regresi data panel yang dipilih dalam penelitian ini adalah model *Fixed Effect Model* (FEM). Penentuan model FEM ini berdasarkan pengujian uji *chow* dan uji *hausman* (Ghozali & Ratmono, 2017).

**Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t/f-Statistic	Prob.
C	13,968	1,827	7,647	0,000
PAD__X1	-0,033	0,29	-1,136	0,258
DP__X2	-0,395	0,066	-5,989	0000
BM__X3	0,114	0,014	7,908	0,000
SILPA__X4	-0,020	0,010	-1,991	0,048
F-statistic			4,491	0,000
Adjusted R-squared	0,432			

Sumber: Data Penelitian, 2022

Persamaan regresi data panel yang diperoleh pada Tabel 3 adalah sebagai berikut.

$$KKPD = 13,968 - 0,033PAD - 0,395DP + 0,1146BM - 0,020SILPA + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 13,968 menunjukkan bahwa apabila nilai PAD, DP, BM dan SILPA sebesar 0 atau tetap sehingga nilai kinerja keuangan akan tetap yaitu 13,968. Koefisien regresi variabel X1 atau PAD sebesar -0,033 menunjukkan setiap peningkatan PAD sebesar 1 satuan maka nilai KKPD akan menurun sebesar 0,033. Koefisien regresi variabel X2 atau DP sebesar -0,395 menunjukkan apabila terjadi peningkatan nilai KKPD akan mengalami penurunan 0,395. Koefisien regresi variabel X3 atau BM sebesar 0,114 menunjukkan apabila nilai belanja modal mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka nilai KKPD akan meningkat 0,114. Koefisien regresi variabel X4 atau SILPA sebesar -0,020 menunjukkan apabila terjadi peningkatan satu satuan pada SILPA, maka nilai Kinerja Keuangan akan menurun sebesar 0,020.

Uji F atau uji signifikansi simultan dapat dilihat dari nilai F-statistik dan nilai probabilitas dengan keyakinan 5%. Nilai F-statistic pada penelitian ini 4,491447 serta nilai probabilitasnya 0,000000. Tingkat keyakinan sebesar 5% dengan total variabel sebanyak 5 dan total sampel sebanyak 189, diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,42. Berdasarkan nilai tersebut, maka F-statistic > F-tabel (4,491447 > 2,42) dan nilai probabilitas F-statistik < 0,05 (0,000000 < 0,05) sehingga H5 diterima, artinya terdapat pengaruh secara simultan variabel bebas dengan variabel terikat.

Nilai R<sup>2</sup> dinilai dari rentang 1 sampai dengan 0, dimana nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 memiliki kemampuan besar dalam menjelaskan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai Adjusted R<sup>2</sup> dalam penelitian ini sebesar 0,0432280 atau sebesar 43,23%. Nilai ini dapat berarti bahwa variabel dependen KKPD dapat dijelaskan oleh variabel independen penelitian ini pada tingkat 43,23%, sedangkan sisanya sebesar 56,77% dijelaskan oleh variabel dependen lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Uji parsial (Uji T) dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel independen dan nilai t-statistic. Apabila nilai prob.  $< 0,05$ , maka variabel independen dapat dikatakan dipengaruhi secara signifikan oleh variabel dependen. Hasil uji t menunjukkan nilai prob. PAD  $0,258 > 0,05$  dan nilai t-statistic sebesar 1,136 lebih kecil dari t-tabel 1,989 yang berarti  $H_1$  ditolak, artinya Kinerja keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh PAD. Penelitian ini menghasilkan bahwa kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh PAD sehingga penelitian ini tidak mendukung teori dan penelitian terdahulu dari (Thalib, 2019) (Sari, 2019), dan (Prastiwi & Aji, 2020) yang menunjukkan kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara negatif oleh PAD. Berdasarkan data penelitian, tingkat penerimaan pendapatan asli daerah di Jawa Timur masih tergolong rendah daripada total pendapatan daerah yaitu sebesar 21,05% sehingga pengelolaan PAD sebagai input dalam pencapaian target pemda di Jawa Timur dinilai kurang efisien serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya daerah melalui pajak dan retribusi masih rendah.

Nilai probabilitas dana perimbangan  $0,000 < 0,05$  dengan tanda koefisien negatif serta nilai t-statistic sebesar 5,989 lebih besar dari t-tabel 1,989 yang berarti jika  $H_2$  diterima, artinya kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif oleh dana perimbangan. Dana perimbangan yang besar akan meningkatkan kinerja keuangan sehingga kinerja keuangan dinilai semakin rendah ketika diukur dengan rasio efisiensi sehingga penggunaan dana transfer harus dilakukan secara bertanggungjawab dan berhati-hati untuk pelaksanaan program suatu pemerintah daerah karena dana ini akan dipantau dan diawasi oleh pemerintah pusat. (Mulyani & Wibowo, 2017). Penelitian ini sejalan dengan teori sebelumnya dari penelitian Yasin (Yasin *et al.*, 2017), Sari (Sari, 2019), (Awwaliyah *et al.*, 2019) dan (Prastiwi & Aji, 2020) bahwa semakin meningkat dana perimbangan akan meningkatkan efisiensi kinerja keuangan. Hal ini berarti pengelolaan keuangan yang berasal dari pemerintah pusat dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan juga pemerintah pusat sesuai dengan teori keagenan yang mana pemerintah daerah memberikan strategi terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan dana perimbangan dari pusat.

Variabel belanja modal memiliki nilai probabilitas  $0,000 < 0,05$  dengan tanda koefisien positif dan nilai t-statistic sebesar 7,908 lebih besar dari t-tabel 1,989 yang berarti jika  $H_3$  diterima, artinya belanja modal berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja keuangan. Artinya, ketika terjadi belanja modal, maka pengeluaran yang dilakukan semakin bertambah sehingga penambahan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin merata dan tepat. Penelitian ini tidak sejalan dengan (Antari & Sedana, 2018) dan (Nugroho & Rohman, 2016). Hal ini disebabkan oleh presentase belanja modal di Jawa Timur lebih rendah daripada belanja daerah. Berdasarkan data penelitian, menunjukkan bahwa alokasi belanja modal pada pemerintah daerah Jawa Timur sebesar 18,7% dari total realisasi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum dapat terealisasi dengan baik sehingga belum sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa belanja pemerintah digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Belanja modal yang kurang dapat menimbulkan adanya pengangguran anggaran yang menyebabkan



angka SILPA membengkak sehingga dana tidak bisa tersalurkan kepada masyarakat dengan semestinya.

Nilai probabilitas SILPA  $0,048 < 0,05$  dengan tanda koefisien negatif dan nilai t-statistic sebesar 1,991 lebih besar dari t-tabel 1,989 sehingga  $H_4$  diterima, artinya bahwa kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif oleh SILPA. Hal ini sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Djuniar & Zuraida, 2018). Penelitian ini dan penelitian terdahulu mendapat hasil yang sama terkait adanya SILPA yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Semakin sedikit angka SILPA dalam laporan keuangan menandai bahwa pembiayaan dilakukan dengan baik untuk membiayai kegiatan serta menutupi defisit yang terjadi sehingga tidak ada dana yang tidak dipergunakan. Dalam penelitian ini, angka SILPA tergolong wajar yang menunjukkan bahwa adanya efisiensi pengeluaran anggaran serta strategi penerapan rencana kerja yang baik oleh pemerintah daerah.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur, kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif signifikan oleh dana perimbangan dan SILPA, serta kinerja keuangan dipengaruhi secara positif signifikan oleh belanja modal. Variabel kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel PAD, variabel dana perimbangan, variabel belanja modal dan variabel SILPA. Hal ini dapat dikatakan apabila ada perubahan pada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan SILPA, maka akan mempengaruhi penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur periode 2016-2020.

Keterbatasan pada penelitian ini hanya membahas mengenai efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah saja, sehingga belum membuktikan apakah ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan selain efisiensi untuk memajukan sebuah pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga kurang berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah karena belum bisa mengoptimalkan pendapatan daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai belanja daerah sendiri dalam memajukan pelayanan masyarakat daerah sehingga tujuan adanya desentralisasi masih belum terlaksana dengan baik.

### REFERENSI

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kotadi Provinsi Bali Tahun 2011-2015). *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080-1110.
- Arsallya, M. R., Azwardi, A., & Yusnaini, Y. (2021). Analysis of factors affecting capital expenditures and their implications on government financial performance provinces in Indonesia 2011-2019. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(5), 95-106. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1195>
- Aswar, K. (2019). Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 4(6), 1-6.

- <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.164>
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., Farida, & Noor, D. (2019). The Effect of Regional Original Income and Regional Financial Performance on Economic Growth in North Sumatera Regency. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 2(2), 25–46. <https://doi.org/10.33122/ijase.v2i2.156>
- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, (PAD), Belanja Modal, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Balance Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 445–455.
- Elmiza, & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Faktor Finansial dan Faktor Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2807–2825. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.250>
- Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi -Provinsi di Sumatera Utara. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariant Dan Ekonometrika* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gomes, R. C., Alfinito, S., & Albuquerque, P. H. M. (2013). Analyzing local government financial performance: evidence from Brazilian municipalities 2005-2008. *Revista de Administração Contemporânea*, 17(6), 704–719. <https://doi.org/10.1590/s1415-65552013000600005>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Madjodjo, F., Saleh, C.M., & Dahlan, F. (2020). The Influence Of Intergovernmental Revenue Budgets And Clarity Of Budget Targets On The Financial Performance Of Regional Governments: The Case Of The Regional Apparatus Organization Of The City Of Tidore Islands. *Jurnal Accountability*, 9(2), 60–71.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mariyam. (2019). Analysis Of Use Of Remaining More Financial Budget Financing, Analysis Of The Use Of Backup Funds And Divestment Analysis Of Management Of Budget Income Budget Income On The Government Of Binjai City. *Accounting and Business Journal*, 01(01), 46–58.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 57–66.
- Nugroho, F., & Rohman, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 1–18. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8707>
- Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010* (pp. 1–413). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*

- Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Rantebalik, B., Tawakkal, T., & S, A. S. (2018). Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 192–207. <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4305>
- Rokhmah, A. N. (2021). *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019* (Issue 1). Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Sari, I. P. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan, dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon*, 4(1), 679–692.
- Sumawan, W. I. dan, & Sukartha, M. I. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Kinerja Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1727–1754.
- Thalib, F. (2019). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten di Jawa Timur periode 2013-2017. In *STIE Perbanas Surabaya*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Udoka, C. O., & Anyingang, R. A. (2015). The Effect of Public Expenditure on the Growth and Development of Nigerian Economy (1980-2012). *International Review of Management and Business Research*, 4(3), 823–834.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. (2009). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009* (Issue 57, p. 3).
- UU RI Nomor 33 Tahun 2004. (2004). *UU RI NOMOR 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 101(3), 55. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Wijayanto, J. (2021). *Dewan Pertanyakan Penyebab SILPA Sebesar Rp 3,7 Triliun*.
- Yasin, M., Riyadi, S., & Ingga, I. (2017). Analisis Pengaruh Struktur APBD terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(2), 493–510.